

**Efisiensi Perencanaan Anggaran Di Dinas Kebakaran dan
Penanggulangan Bencana Kota Bandung Tahun Anggaran 2019-2021**

¹Ilsan Masdrian, Asep Hidayat, Ibnu Malik

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, ilsanmasdrian@gmail.com

Received: July 08, 2022; In Revised: July 29, 2022; Accepted: August 06, 2022

Abstract

The process that becomes an impediment in budget absorption is due to inadequate budget planning at the Bandung City Fire and Disaster Management Office, budget absorption varies and is still weak in carrying out efficiency. The goal of this study is to assess the Bandung City Fire and Disaster Management Departement efficiency in carrying out budget planning utilizing the dimensions of budget policy formulation and budget operational planning, and it can also be utilized as evaluation material in budget planning efficiency. The method used in this research is a qualitative approach and the type of research is descriptive. Primary and secondary data sources were used in gathering data utilizing a purposive sample strategy using information based on people who contribute information based on experience and expertise. The Miles and Hubberman approach was utilized in data analysis, comprising the steps of data reduction, data display, and generating conclusions. According to the findings of this study, the Bandung City Fire and Disaster Management Office's budget planning efficiency could not be optimized.

Keywords: Local Government, Budget, Efficiency, Planning

Pendahuluan

Anggaran merupakan hal yang utama dalam organisasi publik sebagai hal vital bagi pemerintah. Fungsi dari anggaran sebagai instrumen pengendalian dan perencanaan. Sebagai intrumen pengendalian karena terdapat anggaran pengeluaran dan anggaran pemasukan yang harus di pertanggung jawabkan kepada publik. Sedangkan anggaran sebagai instrumen perencanaan karena anggaran dipakai untuk merencanakan kegiatan ataupun program oleh organisasi publik serta rincian biaya secara detail. Anggaran dapat memberi informasi yang gamblang berkenaan tujuan, sasaran, hasil dan manfaat yang berasal dari suatu kegiatan. Organisasi publik merupakan sekumpulan orang yang besar yang menampung semua lapisan masyarakat berada ruang lingkup negara dan memiliki otoritas yang absah pada bidang politik, administrasi dalam pemerintah dan berkewajiban melindungi warga negaranya dan juga melayani kepada masyarakat apa yang diperlukan (Hidayat, 2018) .

Menurut Mahmudi (2016), organisasi pada sektor publik memiliki karakter sebagai organisasi pada sektor publik bergerak dalam penyediaan barang dan pelayanan publik yaitu penyediaan barang publik dan juga pelayanan terhadap publik Dalam organisasi publik, administrasi publik diperlukan karena ada ilmu administrasi yang merupakan sistem pengetahuan dimana manusia dapat memahami hubungan memprediksi efek dan mempengaruhi hasil dalam situasi di mana orang secara teratur bekerja sama untuk tujuan tertentu (Sellang, 2016).

Akuntansi pemerintah adalah bidang khusus akuntansi yang digunakan oleh instansi pemerintah. Bidang ini berguna sebagai alat bagi pemerintah untuk memelihara catatan penerimaan dan pengeluaran dana secara teratur. Menurut Bastian (2010) bahwa Akuntansi Sektor Publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada dua pengelolaan dana masyarakat di berbagai lembaga tinggi negara dan departemen di bawahnya.

Akuntansi pemerintah wajib diterapkan supaya pengelolaan dana masyarakat bisa dilaksanakan dan diterapkan serta bisa diterapkan dengan baik ke masyarakat. Salah satu instansi pemerintahan daerah yang menggunakan akuntansi untuk mengambil keputusan pengelolaan dana masyarakat adalah Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (DKPB) Kota Bandung. Dana masyarakat yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung dikelola dan digunakan untuk memenuhi persyaratan melaksanakan tugas pokoknya di bidang pelayanan langsung kepada masyarakat. Berdasarkan prinsip akuntansi, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan, yaitu dengan membuat rencana anggaran biaya.

Perencanaan anggaran setidaknya harus memenuhi syarat sebagai salah satu bidang penting dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Namun terkadang perencanaan selalu menimbulkan perbedaan ketika memasuki tahun berjalan berikutnya, baik dalam bentuk apapun seperti ada beberapa rencana kegiatan yang lupa untuk dilakukan estimasi sehingga SKPD tersebut akhirnya membuat perubahan rencana. Kondisi tersebut yang menyebabkan dalam kurun waktu satu tahun anggaran SKPD sering kali mengalami kekurangan dana untuk melanjutkan operasional mereka sampai tahun berakhir. Telah berlalu lama efisiensi pada pemerintahan daerah dirasa masih terlalu lemah karena SKPD masih belum menjalankan perannya dengan cara efisien. Lemahnya perencanaan pengeluaran anggaran mempengaruhi tingkat efisiensi pada setiap SKPD atau unit pemerintahan daerah. Perencanaan adalah rangkaian dasar yang diperuntukkan menentukan tujuan dan cakupan pencapaian, proses perencanaan selain harus memperhatikan prosedur normatif tetapi harus efisien dan efektif (Sakti, 2014).

Selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah aturan yang menjelaskan dalam perancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dilakukan oleh tim anggaran eksekutif atau sekretaris daerah beserta SKPD. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisikan rencana pendapatan, rencana belanja yang memuat program & kegiatan SKPD. Mengenai efisiensi perencanaan yang dinyatakan oleh (William, 2011) yaitu :*“the planning and program assessment will result in coordination and greater efficiency in the allocation or resoucer”*. Dari definisi di atas tersebut dapat dipahami bahwa efisiensi dalam alokasi sumber daya akan besar tingkat efisiensinya dari melakukan perencanaan dan penilaian program atau memperhitungkan spekulasi program yang akan dilaksanakan dan pengkoordinasiannya pun akan menjadi berjalan lancar. Maka dalam perencanaan tersebut harus sesuai anggaran atau pagu anggaran dengan realisasi anggaran.

Penganggaran pada pemerintahan ada alur penentuan jumlah dana di setiap aktivitas dan program yang akan dijalankan. Pengelolaan anggaran harus dilakukan dengan optimal agar efisien, karena hal tersebut berhubungan dengan realisasi dan target yang telah direncanakan, anggaran belanja dapat menjadi salah satu tolak ukur kinerja dan kemampuan sebuah organisasi publik dalam membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan juga pelayanan terhadap masyarakat. Jika keuangan organisasi publik belum efisien, maka bisa juga menjadi faktornya yaitu perencanaan pada anggaran. Oleh karena itu anggaran dapat menjadi pembanding antara yang terdapat pada anggaran dan realisasinya, sehingga bisa mengetahui kesuksesan organisasi publik dalam hal pelaksanaan anggaran. Dengan adanya pembanding itu kita bisa mengetahui penyebab penyimpangan hingga mengetahui kelemahan dan kekuatan yang berada pada organisasi publik. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah mengatakan bahwa Efisiensi sebagai Hubungan antara *input* dan *output*, dalam ukuran penggunaan barang atau jasa dan di gunakan oleh perangkat pemerintah untuk mencapai tujuan dan dapat tercapai manfaat tertentu.

Seperti yang dikutip oleh (Nurkholis & Khusaini, 2019) buku penganggaran sektor publik (Rubenstein, 2002, Mardiasmo, 2002) anggaran Sektor publik memiliki peran utama yaitu:

a. Alat Perencanaan

Alat perencanaan karena digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran diperuntukkan merencanakan pergerakan dilakukan oleh SKPD, merencanakan program dan alternatif pembiayaan, merencanakan alokasi dana ke berbagai program atau kegiatan

b. Alat Pengendalian

Anggaran menjadikan menghubungkan proses pengendalian dan perencanaan. Kenapa disebut alat pengendalian karena anggaran memberikan perencanaan secara rinci atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk mencegah pemborosan pembelajaran yang dilakukan bisa dipertanggung jawabkan terhadap publik. Hal ini sebagai mana di nyatakan dalam ayat 3 Pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara di mana tiap-tiap pejabat dilarang mengeluarkan anggaran tetapi tidak ada anggaran yang tersedia. Bagi pejabat negara yang melakukan penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran negara akan dikenai sanksi hukum, sanksi administrasi, dan tuntutan ganti rugi. Hal ini sebagai mana diatur dalam Pasal 34 dan 35 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

c. Alat Kebijakan Fiskal

Dipergunakan menstabilkan ekonomi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik bisa mengetahui arah kebijakan fiskal pemerintahan, kemudian bisa memprediksi dan estimasi ekonomi.

d. Alat Politik

Sebagai bentuk komit antara eksekutif dan kesepakatan legislatif dan juga menerima aspirasi dari masyarakat atas penggunaan anggaran publik. Dalam perencanaan anggaran publik memerlukan keterampilan dalam berpolitik, membangun koalisi, dan juga berketerampilan bernegosiasi.

e. Alat Koordinasi dan Komunikasi

Dalam perencanaan anggaran, SKPD akan selalu terlibat. Alat koordinasi antara bagian lembaga di dalam pemerintahan. Untuk mendeteksi inkonsistensi. Dan anggaran harus dikomunikasikan ke semua bagian organisasi untuk dilaksanakan.

f. Alat Penilaian Kinerja

Anggaran adalah metode efektif untuk memantau dan menilai dalam kinerja, di mana dapat menjadi evaluasi berdasarkan pencapaian tujuan anggaran dan efisiensi dalam pelaksanaan anggaran. Analisis varians dilakukan untuk melihat seberapa efisien pencapaian anggaran dengan cara mengevaluasi selisih yang terjadi antara anggaran dengan realisasi.

g. Alat Motivasi

Anggaran dipergunakan alat untuk memotivasi kepala bagian dan pegawai lainnya untuk bekerja dengan cara ekonomis, efektif dan efisien dalam menggapai target & tujuan organisasi yang telah direncanakan. Sasaran dalam penganggaran jangan terlalu tinggi (susah dipenuhi) dan juga tidak terlalu rendah bisa mudah untuk dipenuhi

Pada Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah terdapat ada poin mengenai efisien dalam pengelolaan anggaran dan dijelaskan juga sebagaimana efisiensi adalah pencapaian *output* maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* terendah untuk mencapai *output* tertentu. Dan juga dalam fungsi perencanaan daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan untuk tahun yang bersangkutan, dalam perencanaan tersebut memperhatikan hubungan antara pendanaan dengan keluaran dan hasil yang diharapkan dari kegiatan dan program, termasuk efisiensi dalam mencapai keluaran dan hasil tersebut.

Desentralisasi di sektor pemerintah terealisasi dalam SKPD, Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Sekretaris Daerah. Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) merupakan langkah awal perwujudan APBD. DPA-SKPD ialah dokumen sebagai acuan dasar untuk melaksanakan anggaran oleh kepala SKPD selaku yang menggunakan anggaran. Dalam rancangannya DPA meliputi target yang akan dicapai, program & kegiatan anggaran yang telah disediakan untuk mencapai target yang ada. Lalu pejabat pengelola keuangan daerah melakukan verifikasi. Hasil verifikasi pejabat pengelola keuangan daerah pengesahan DPA-SKPD atas persetujuan Sekretaris Daerah. Dalam DPA yang telah diberikan dari SKPD yang disusun format RKA, SKPD harus menginformasikan yang jelas mengenai sasaran di antara besaran anggaran dengan utilitas atau hasil diperoleh masyarakat dari suatu program, serta tujuan yang akan dicapai.

Pengelolaan anggaran daerah harus menggambarkan efisien dan efektivitas pada pelayanan publik yang berorientasi terhadap masyarakat. Efisiensi berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya sementara efektivitas mempertimbangkan kinerja. Anggaran bisa menjadikan untuk lebih meningkatkan efisien administrasi. Terdapat *output* dan *outcome* maka diharapkan tercipta efisien dan efektivitas pelaksanaan (Nurkholis & Khusaini, 2019).

Akuntansi di sektor publik adalah aktivitas layanan yang memerlukan dari pencatatan, klasifikasi, dan pelaporan peristiwa atau interaksi transaksi ekonomi, yang akan pembuatan data keuangan yang akan diperlukan oleh pihak khusus untuk membuat keputusan, diimplementasikan pada mengurus dana publik di instansi publik (Sujarweni, 2015).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) mencakup pos pendapatan, belanja dan surplus atau defisit. Seperti yang dikutip oleh (Nurkholis & Khusaini, 2019) menurut Furqan (2012) LRA menyediakan informasi yang menjadi dasar dalam memprediksi penerimaan sumber daya ekonomi. Melalui informasi tersebut pengguna laporan keuangan pemerintah dapat melakukan evaluasi dan penilaian apakah sesuai dengan anggaran dan peraturan perundangan.

Kinerja keuangan yang tercermin dari salah satunya laporan realisasi anggaran yang perlu di analisis agar dapat menjadikan bayangan atau gambaran kinerja keuangan oleh SKPD, analisis belanja daerah diperlukan untuk kebutuhan evaluasi anggaran pemerintah telah digunakan secara ekonomis, efektif dan efisien. Sementara itu informasi yang digunakan untuk mengukur kinerja yaitu melalui informasi finansial, pada penilaian kinerja finansial menganalisis varians pengeluaran atau belanja dengan realisasi yang dianggarkan (Sujarweni, 2015). Terdapat jenis organisasi sektor publik adapun pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung data terkait Laporan Realisasi Anggaran tahun 2019-2021.

Tabel 1.
Laporan Realisasi Anggaran

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2019	69.364.559.797,67	63.128.819.881	91,01%
2020	26.802.875.783,80	23.864.020.158	89,04%
2021	46.492.264.708	44.484.648.032	95,68%

Sumber: Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung Tahun 2019 – 2021 (2022)

Bersumber data realisasi anggaran di atas, realisasi anggaran belanja pada DKPB Kota Bandung Tahun 2019-2020 belum mencapai target yang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 258/PMK.02/2015 pasal 3 ayat (2) persentase realisasi dan penyerapan paling sedikit yaitu sebesar 95%, apabila besaran persentase tersebut di bawah 95% maka akan terkena sanksi, dengan pemotongan anggaran pada tahun berikutnya. DKPB Kota Bandung pada tahun 2019 persentase penyerapan realisasi terjadi 91,01% dari target anggaran sebesar Rp 69.364.559.797,67. Kemudian pada tahun 2020 realisasi anggaran mengalami penurunan kembali dengan persentase 89,04% dari target anggaran sebesar Rp26.802.875.783,80. Lalu pada tahun 2021 penyerapan anggaran mengalami peningkatan signifikan dengan persentase penyerapan sebesar 95,68% . Jika dilihat dari tahun 2019 hingga 2021 realisasi anggaran pada DKPB Kota Bandung mengalami fluktuatif tercapainya persentase ketentuan yang telah ditetapkan, di mana besaran realisasi anggaran atau penyerapan anggaran ada yang masih di bawah 95%.

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung LRA 2019-2021 menurut (Halim, 2016) proses yang menjadi terhambatnya penyerapan anggaran dikarenakan perencanaan anggaran yang kurang baik. Maka dari itu perlu sesuai dengan penjelasan terkait permasalahan di atas dapat dikaji dengan teori perencanaan anggaran dari (Mahsun, 2019). Terdapat dua aspek yang terdiri dari:

1. Formulasi Kebijakan Anggaran

Perumusan kebijakan anggaran adalah penyusunan arah dan kebijakan

APBD umum sebagai dasar perencanaan operasional. Terdapat indikator terdiri dari:1) kebijakan pemerintah, 2) Asumsi dasar, 3) Aspirasi jejaring masyarakat, 4) Kinerja masa lalu, 5) Estimasi kapasitas keuangan daerah.

2. Perencanaan Operasional Anggaran

Perencanaan operasional pada dasarnya merupakan gambaran dari tujuan dan target yang ditetapkan dalam perencanaan strategis. Perencanaan Operasi umumnya berupa program kegiatan yang akan dilaksanakan berikut target kinerja yang ingin dicapai terdiri: 1) Penyusunan rencana kegiatan, 2) Alokasi sumber daya.

Pada penelitian sebelumnya pada judul “*Dinamika Perencanaan Anggaran Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Buru Selatan*” dilakukan oleh (Wance, 2019) bahwa pada permasalahan yang dilakukan penelitian tersebut dikarenakan rencana anggaran sebagai alat memprediksi perencanaan pembangunan satu periode ke depan dan juga untuk mengetahui dinamika perumusan APBD Buru Selatan. Pada hasilnya perencanaan anggaran yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten sebagai eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai legislatif lebih dominan pada saat pembahasan rancangan anggaran pada tiap komisi pada yang dibidangkan beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), maka posisi DPRD lebih dominan dalam pembahasan anggaran. DPRD lebih melakukan negosiasi terhadap SKPD terkait program yang akan dijalankan pada setiap SKPD, bernegosiasi anggaran publik.

Penelitian yang dilakukan (Nandang et al., 2021) yang berjudul “*Perencanaan Anggaran Dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan di Sekolah Menengah Pertama*”, pada permasalahan tersebut bahwa sarana dan prasarana perpustakaan harus memadai sehingga diperlukan perencanaan anggaran untuk melengkapi seluruh sarana dan prasarana, dari hasil penelitian tersebut perencanaan anggaran mengenai sarana dan prasarana pada perpustakaan di sekolah menengah pertama dilaksanakan sudah baik sehingga seluruh fasilitas sudah memadai, perpustakaan sudah bisa dijalankan dengan baik efisien dan efektif juga, dalam perencanaan anggaran sarana dan prasarana di perpustakaan disekolah ini sumber dana berasal dari APBD, Anggaran Pendapatan Belanja Negara, sumbangan yayasan yang tidak berikat dan juga sumber dana BOS yang dialokasikan untuk perpustakaan. Dalam UU No. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan mewajibkan pemerintah daerah provinsi & pemerintah kabupaten atau kota untuk menyediakan anggaran sebesar 5% untuk pengelolaan perpustakaan, sehingga seluruh yang telah direncanakan sesuai dengan realisasi yaitu melengkapi seluruh sarana dan prasarana perpustakaan.

Penelitian terdahulu di atas dijelaskan, bahwa penelitian yang diambil saat ini peneliti mengambil bagaimana efisiensi perencanaan anggaran. Lalu *novelty* atau hal yang membuat membedakan penulis dengan penelitian sebelumnya, yaitu penulis melakukan dengan teori dari (Mahsun, 2017) mengenai dua aspek perencanaan anggaran. Penelitian mempunyai tujuan mengetahui dengan rumusan masalah sebagai berikut : (1) Bagaimana perencanaan anggaran Di Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung agar efisien ditinjau dari formulasi kebijakan anggaran?, (2) Bagaimana pelaksanaan perencanaan anggaran Di Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung agar efisien ditinjau dari perencanaan operasional anggaran. Penelitian ini untuk menganalisis Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dalam melakukan efisien perencanaan anggaran dengan menggunakan dimensi formulasi kebijakan anggaran dan perencanaan operasional anggaran.

Metode Penelitian

Pengkajian mengenai efisiensi perencanaan anggaran, penulis melakukan pendekatan penelitian kualitatif karena menganalisis data fakta secara sistematis. Dinyatakan oleh Lanka et al., (2021) bahwa pendekatan kualitatif yaitu meliputi induktif, subjektif dan interpretatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data, penempatan lokasi pengumpulan data kualitatif dalam pengaturan alami di mana fenomena penelitian terjadi. Menekankan pada dimensi sosial dan manusia dari penelitian, menempatkan fokus perhatian mereka pada cara individu memersepsikan, mengalami dan memahami dunia. Lalu, peneliti juga melakukan penelitian dengan jenis penelitian deskriptif yang bertujuan untuk memudahkan menerangkan dan juga memahami kondisi dan kajian yang diteliti. Dinyatakan oleh (Anggara, 2015) penelitian deskriptif yang menjelaskan sesuatu yang menjadi tujuan penelitian yang diungkapkan secara mendalam dari berbagai aspek

Untuk mendukung dalam analisis penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *puposive sampling* dalam pemilihan narasumber dengan kualitas yang dimiliki oleh narasumber yang bukan pemilihan secara acak. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Etikan (2016), bahwa peneliti yang memilih yang dijadikan sebagai orang bersedia membagikan informasi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan. Lalu, peneliti akan melakukan wawancara dengan narasumber atau informan merupakan pegawai Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung, yaitu Kepala Pelaksana Tugas Dinas, Kepala Sub Bagian Program dan Kepala Sub Bagian Keuangan.

Peneliti telah melakukan studi dokumentasi mengenai data, pengumpulan data berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Dalam teknik analisis data peneliti yang digunakan ialah Milles & Hubberman didalam buku (Sugiyono, 2018) dengan tahapan dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Dalam pembahasan peneliti bermaksud menguraikan hasil dari penelitian berdasarkan data observasi, dokumentasi, serta wawancara di Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (DKPB) Kota Bandung. Berdasarkan teori Mohamad Mahsun mengenai perencanaan anggaran, terdapat dua dimensi mengenai perencanaan anggaran yang meliputi formulasi kebijakan anggaran dan perencanaan operasional anggaran.

1. Formulasi Kebijakan Anggaran

Formulasi kebijakan anggaran adalah aktivitas penyusunan arah dan kebijakan umum selaku dalam perencanaan operasional. Dalam penyusunan perencanaan anggaran pada dasarnya harus berdasarkan pada sasaran dan kebijakan tertentu yang menggambarkan komponen dan tingkat pelayanan yang akan dicapai dalam satu tahun periode anggaran.

Terdapat penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 ada yang harus diperhatikan dalam pengalokasian anggaran terdiri yaitu kebutuhan yang sangat mendasar dalam sistem pengelolaan administrasi pemerintahan yaitu biaya operasional satuan kerja pada setiap kementerian atau lembaga, lalu kebutuhan memenuhi tugas dan fungsi satuan kerja dan juga kebutuhan untuk memenuhi mendukung pencapaian kegiatan atau program prioritas. Pada DKPB Kota Bandung diharuskan berkomitmen dan moral dalam merancang setiap program agar tercapainya sasaran yang diinginkan.

Peneliti dalam mewawancarai berkenaan dengan dimensi formulasi kebijakan anggaran menggunakan lima indikator yang terdiri dari kebijakan pemerintah, asumsi dasar, penjarangan aspirasi masyarakat, kinerja masa lalu dan estimasi kapasitas keuangan.

Kebijakan Pemerintah

Berdasarkan hasil wawancara berkaitan dengan indikator pertama mengenai kebijakan pemerintah kepada Kepala Plt DKPB Kota Bandung bahwa ketika dalam perencanaan anggaran berhubungan dengan kebijakan selalu mengkoordinasikan visi dan misi kepala daerah dengan kepala dinas dan kepala dinas agar tetap sesuai berdasarkan hasil wawancara juga menyatakan Sangat memperhatikan efektivitas dan efisiensi orientasi kepentingan masyarakat dan juga mempertimbangkan pada perubahan kebijakan alokasi anggaran, seperti yang diakibatkan oleh Pandemi *Covid-19* yang merupakan isu lingkungan strategis, dalam menentukan kebijakannya juga prosedur praktik bisnis lintas perangkat daerah harus dipertimbangkan agar anggaran efektif dan efisien dan juga Kepala Plt DKPB Kota Bandung bahwa pada SKPD tersebut setiap tahun selalu terjadi pasti ada perubahan kebijakan setiap tahun.

Kondisi ini berkembang sebagai akibat dari variasi pendapatan daerah, yang mempengaruhi pencapaian kinerja dan perlu penyesuaian metode terkait kinerja. meskipun perubahan tersebut biasanya tidak terlalu penting karena jangka waktu pelaksanaan anggaran yang sangat singkat. Hal ini cukup berdampak pada efektivitas anggaran juga. Salah satunya dengan melakukan efisiensi anggaran dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas. Setelah itu peneliti melakukan wawancara yang sama pada Kepala Sub. Bagian Program dan Kepala Sub. Bagian Keuangan, DKPB Kota Bandung melakukan pertimbangan ketika dalam penyusunan kebijakan anggaran sebagai yang disampaikan oleh narasumber bahwa

pertimbangan tersebut ialah menentukan tujuan yang hendak dicapai, lalu mengkaji pengalaman-pengalaman di masa lalu, selain itu melihat prospek perkembangan masa yang akan datang, dan Menyusun rencana yang bersifat umum mengenai apa yang akan dilaksanakan. Selain itu dalam penyusunan kebijakan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Rencana Strategi (Renstra) atau Rencana Kerja (Renja), karena IKU merupakan sebagai ukuran atas keberhasilan dan juga pencapaian dari sebuah organisasi. Hal tersebut dilaksanakan di DKPB Kota Bandung melalui proses penyusunan yang Panjang dari rencana awal hingga rancangan akhir dari dokumen perencanaan tersebut agar pemangku kepentingan dapat memahami isi dan manfaat indikator tersebut.

Dalam membuat kebijakan anggaran SKPD menilai dan mengolah data serta lakukan verifikasi terhadap capaian kinerja yang terdapat dala dokumen pelaporan seperti Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) yang dijadikan *baseline* dalam penyusunan kebijakan anggaran untuk periode berikutnya, setiap tahun juga hampir dipastikan terjadi perubahan kebijakan karena pendapatan daerah yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami fluktuasi, hal tersebut berpengaruh terhadap efisiensi anggaran. Untuk di masa pandemi *Covid-19* hal ini adanya perubahan kebijakan alokasi anggaran (*Refocusing*) berdampak terhadap capaian kinerja dan mengharuskan merubah strategi untuk mencapainya, dan juga mempertimbangkan dan menyelaraskan visi dan misi kepala daerah atau kepala dinas, DKPB Kota Bandung mempertimbangkan agar anggaran efisien dan efektif memperhatikan proses bisnis saat forum lintas perangkat daerah yang orientasinya kepada kepentingan masyarakat sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

Asumsi Dasar

Berdasarkan hasil wawancara berkaitan indikator kedua yaitu asumsi dasar , hal ini harus diperlukan untuk menganalisis suatu masalah dan asumsi inilah yang mendukung kerangka kerja (Mayasari et al., 2022; Prasetyo et al., n.d.). Dengan narasumber Kepala Plt Dinas bahwa SKPD Selalu pertimbangkan tahun di mana strategi anggaran akan diterapkan sambil menentukan arahnya. Misalnya, pertimbangkan data statistik tahun ini tentang tingkat pertumbuhan ekonomi untuk memperkirakan kemungkinan inflasi di tahun berikutnya. perencanaan anggaran dalam menentukan kebijakan selalu bertujuan untuk efisiensi, dan penganggaran menempatkan proyek-proyek penting terlebih dahulu, selain itu, pembuatan anggaran termasuk efisiensi, selalu melibatkan kondisi dan asumsi dari tahun berjalan. Karena wabah *Covid-19* baru saja berakhir, fokusnya sekarang adalah pada tahap pemulihan ekonomi. Susunan anggaran akan terpengaruh oleh pemulihan dari pandemi.

Peneliti melakukan wawancara pada Kepala Sub. Bagian Program dan Kepala Sub. Bagian Keuangan bahwa SKPD dalam menyusun arah kebijakan anggaran selalu melihat terlebih dahulu kondisi pada tahun yang akan dijalankan , seperti melihat data statistik tahun berjalan tentang angka pertumbuhan ekonomi mengantisipasi terjadinya kemungkinan inflasi di tahun yang akan datang dan efisiensi selalu menjadi tujuan dalam kebijakan anggaran dan penganggaran program yang bersifat prioritas, seperti pandemik *Covid-19* yang baru berakhir dan prioritas saat ini adalah pada tahap pemulihan ekonomi. Hal tersebut akan berdampak pada komposisi penganggaran untuk urusan lainnya termasuk Sub Urusan kebakaran dan Sub Urusan Bencana sehingga skala prioritas menjadi acuan dalam penetapan kebijakan anggaran.

Aspirasi Masyarakat

Hasil wawancara berkaitan indikator ketiga ialah aspirasi jejaring masyarakat, hal ini menggambarkan perlunya pemangku kepentingan yang kuat yang dapat mendukung penganggaran dan memiliki suara dalam pengambilan keputusan oleh pemerintah (Polzer et al., 2021). Dengan narasumber Kepala Plt DKPB Kota Bandung bahwa pembuatan kebijakan anggaran yang mempertimbangkan ambisi pemangku kepentingan sangat penting karena akan membantu mencegah kesalahan pembuatan kebijakan dan memberikan informasi yang akurat tentang keadaan di mana masyarakat berada sekarang, menyerap aspirasi menggunakan metode partisipatif, semua pemangku kepentingan yang terlibat dengan pembangunan diikutsertakan dalam proses perencanaan. Partisipasi mereka bertujuan untuk inspirasi menanamkan rasa tujuan dan rasa kebersamaan .dilakukan pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan reses.

Peneliti juga melakukan wawancara pada Kepala Sub. Bagian Program dan Kepala Sub. Bagian Keuangan bahwa SKPD melakukan formulasi kebijakan anggaran DKPB Kota Bandung selalu melibatkan aspirasi dari *stakeholders* karena hal tersebut akan mengurangi kesalahan dalam mengambil kebijakan dan juga akan menjadi informasi yang aktual berkenaan kondisi terkini untuk kebutuhan masyarakat. Seperti amanat UU 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan yaitu politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah dan bawah-atas. SKPD melakukan perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksana dengan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan, hal tersebut untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki, dan juga proses tersebut melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) selain itu dengan reses dengan melakukan komunikasi antara legislatif dengan konstituen.

Kinerja Masa Lalu

Berkaitan dengan indikator keempat ialah kinerja masa lalu, berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber yang sama, Kepala Plt Dinas bahwa sebagai SKPD dapat menentukan sejauh mana tujuan dan sasaran organisasi telah dicapai melalui pengukuran kinerja dan pembuatan target kinerja, kinerja dalam proses perencanaan anggaran tahun sebelumnya sangat dipertimbangkan untuk tahun berikutnya. Penyesuaian dapat dilakukan terhadap indikator kinerja dan tujuan kinerja jika ada hambatan untuk mencapainya. periode tahun sebelumnya merupakan runtun waktu yang berkaitan untuk perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan pertanyaan yang sama kepada Kepala Sub. Bagian Program dan Kepala Sub. Bagian Keuangan menjelaskan bahwa kinerja dalam penyusunan kebijakan perencanaan anggaran selalu mempertimbangkan anggaran pada tahun sebelumnya untuk tahun yang akan datang, karena melalui pengukuran kinerja serta penetapan target kinerja dapat terlihat sejauh mana tujuan dan sasaran organisasi bisa tercapai, apabila terjadi kendala dalam pencapaian dapat dilakukan penyesuaian Kembali perihal indikator kinerja dan target kerjanya. Selain itu menjalankan juga amanat Peraturan Presiden (Perpres) 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan sasaran global pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan dan mengurangi kerentanan terhadap kejadian ekstrem iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana. Kinerja DKPB Kota Bandung dari periode tahun sebelumnya merupakan *timeseries* yang tidak terpisahkan atau akan terus berhubungan untuk proses perencanaan dan penganggaran tahun selanjutnya dikarenakan bersifat akumulatif.

Estimasi Kapasitas Keuangan Daerah

Peneliti mewawancarai juga indikator kelima yaitu estimasi kapasitas keuangan daerah kepada narasumber yang sama, Kepala Plt Dinas selaku kepala SKPD mengenai estimasi kapasitas keuangan daerah bahwa selain perubahan kapasitas keuangan yang tidak terduga dan kapasitas yang diberikan pun jelas mempengaruhi pelaksanaan kegiatan yang dilakukan, oleh karena itu kami juga memfokuskan dan merealokasi anggaran sesuai dengan arahan dan kebijakan kepala daerah dan juga melakukan efisiensi yang bersifat penunjang. Lalu melakukan wawancara juga pada Kepala Sub. Bagian Program dan Kepala Sub. Bagian Keuangan, Indonesia untuk pertama kalinya menghadapi bencana pandemi *Covid-19* dalam penyusunan formulasi kebijakan publik mengalami perubahan pemberian anggaran yang diberikan, perubahan kapasitas anggaran tidak terduga perubahan tersebut terjadi hingga 5 kali yang menyebabkan berpengaruh terhadap pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga DKPB Bencana Kota Bandung melakukan *refocusing* dan relokasi anggaran sesuai arah dan kebijakan kepala daerah, adanya hal yang disiasati untuk melakukan efisiensi yaitu pada anggaran yang bersifat penunjang seperti anggaran perjalanan dinas, rehab dan pemeliharaan gedung, pembatasan belanja pakaian dinas, dan pembatasan belanja makan dan minum tamu.

Peneliti menganalisis bahwa penyusunan formulasi kebijakan anggaran petugas yang bertugas dibidangnya melakukan segala pertimbangan dalam kebijakan anggaran yang akan digunakan di SKPD dengan memperhatikan efisiensi anggaran dan tanpa melupakan efektifitasnya namun terkadang adanya yang mempengaruhi untuk melakukan efisiensi anggaran karena adanya perubahan kebijakan setiap tahunnya dan juga waktu pelaksanaan anggarannya sangat pendek dan juga ditambahnya ada kondisi pandemi *Covid-19* membuat perubahan anggaran dalam rangka penanggulangan pandemi. Selain itu mereka juga melakukan pertimbangan dalam penyusunan mengenai formulasi kebijakan anggaran yang terus dilakukan agar segala pertimbangan yang dilakukan untuk mengantisipasi inflasi yang akan datang, dalam penyusunannya tetap melibatkan *stakeholders* untuk mendapatkan aspirasi terhadap pembangunan dan rasa memiliki lalu dijadikannya informasi yang aktual untuk mencapai sasaran kebutuhan masyarakat. Dalam memformulasikan kebijakan anggaran selalu melihat periode sebelumnya sebagai pertimbangan agar tujuan dan sasaran SKPD tercapai. Pada estimasi kapasitas keuangan daerah DKPB Kota Bandung berhubungan oleh pandemi yang sedang di hadapi terjadi penganggarannya yang tidak terduga sehingga SKPD melakukan perubahan kebijakan mengenai penganggaran dengan melakukan *refocusing* dan relokasi. Tindakan tersebut menurut peneliti hal yang harus dilakukan dan memang bagus untuk dilakukan oleh SKPD di saat adanya kejadian yang tidak terduga seperti itu namun DKPB Kota Bandung membuat adanya program atau kegiatan yang akan dijalankan seperti terganggu karena perubahan anggaran yang tidak terduga tersebut, dengan perubahan-perubahan kebijakan menjadi berpengaruh terhadap efisiensi anggaran pada SKPD.

2. Perencanaan Operasional Anggaran

Perencanaan operasional merupakan penyusunan rencana kegiatan dan alokasi sumber daya. Kebijakan dan tujuan strategis yang dibuat dari rencana strategis diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran terukur yang akan dicapai selama masa periode berjalan melalui perencanaan operasional (Kee, 2003). Perencanaan operasional itu penting, karena melalui proses ini, berkaitan dengan kebijakan, organisasi, dan masalah implementasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Peneliti mewawancarai berkenaan dimensi perencanaan operasional anggaran terdiri dari dua indikator yaitu penyusunan rencana kegiatan dan alokasi sumber daya.

Rencana Kegiatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pada Kepala Plt Dinas ,Kepala Sub. Bagian Program dan Kepala Sub. Bagian Keuangan, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung, dengan indikator pertama yaitu rencana kegiatan, jumlah program telah diperhitungkan dengan anggaran yang telah ada di mana jumlah keluaran program ada tiga dan terdiri dari 10 kegiatan dan 35 sub kegiatan. karena Kegiatan yang telah ada dipertimbangkan saat membuat anggaran. Lalu, Kepala Sub. Bagian Program dan Kepala Sub. Bagian Keuangan SKPD melakukan perencanaan anggaran disesuaikan dengan jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditentukan dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kementerian dalam negeri (Kemendagri) yaitu ada terdiri tiga program di antaranya adalah program penanggulangan bencana terdiri tiga kegiatan dan 4 sub kegiatan, lalu ada program pencegahan, penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran terdiri dari satu kegiatan dan 13 sub kegiatan, lalu program terakhir yaitu program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri dari enam kegiatan dan juga 18 sub kegiatan. Maka keseluruhan ada tiga program 10 kegiatan dan 35 sub kegiatan. Keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut sudah ditentukan dengan anggaran yang akan disediakan.

Alokasi Sumber Daya

Peneliti kemudian mewawancarai dengan narasumber yang sama berkenaan indikator kedua yaitu alokasi sumber daya, hasil dari Kepala Plt Dinas bahwa DKPB Kota Bandung ini masih menghadapi ketidaklengkapan dalam menggunakan peralatan kebakaran yang mendukung dalam tugas karena anggaran harus terbagi dengan pembayaran gaji terhadap 242 Petugas Harian Lepas (PHL) untuk memenuhi standar minimal pelayanan dasar urusan kebakaran kapasitas sebagai salah satu syarat mutu layanan, jadi alokasi sumber daya mempengaruhi terhadap perencanaan anggaran pada dinas tersebut. Selain itu juga kompetensi pegawai dalam perencanaan anggaran masih belum maksimal. Peneliti melakukan wawancara juga pada Kepala Sub. Bagian Program dan Kepala Sub. Bagian Keuangan dengan hasil dalam pengalokasian sumber daya maupun manusia atau pemeliharaan alat dapat mempengaruhi terhadap perencanaan anggaran DKPB Kota Bandung selain itu SKPD tersebut masih memiliki keterbatasan dalam penggunaan alat kerja yang mendukung dalam tugas pokok dan fungsi. Sumber Daya Manusia (SDM) pada SKPD ini pada tahun 2017 hingga 2019 mengalami sangat kurang dalam memenuhi standar Pelayanan Minimal sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota. Dalam pemenuhan tersebut kapasitas aparatur harus memiliki kualitas dan kuantitas yang memenuhi, sehingga DKPB Kota Bandung melakukan dua kali perekrutan. Maka pengalokasian anggaran pun pada sumber daya tidak dilakukan efisiensi karena biaya gaji yang terserap cukup memakan besar, serta masih kurangnya sumber daya manusia karena belum optimalnya kompetensi pegawai dalam penyusunan dan perencanaan anggaran

Peneliti melihat DKPB Kota Bandung dalam merencanakan kegiatan disesuaikan dengan perencanaan anggaran sehingga anggaran dengan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang telah direncanakan. Peneliti juga menganalisis bahwa berkenaan dengan alokasi sumber daya pada SKPD ada yang menjadikan hambatan dalam melakukan efisien perencanaan anggaran hal mempengaruhi tersebut ialah dari sumber daya manusia dan alat dalam melakukan kegiatan, di mana alat kerja yang mendukung SKPD masih memiliki keterbatasan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, peneliti sempat menemukan adanya pegawai yang membeli peralatannya sendiri melalui wawancara informal, selain itu juga SDM pada SKPD tersebut sempat kurang dalam memenuhi standar pelayanan minimal

sehingga melakukan perekrutan yang menyebabkan tidak mencapai efisiensi karena gaji yang memakan anggaran cukup besar, dan juga belum optimalnya kompetensi pegawai dalam penyusunan dan perencanaan anggaran sehingga menyebabkan akan cukup sulit dalam melakukan perencanaan anggaran.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di atas pada hasil dan pembahasan, terdapat simpulan bahwa pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung dalam melakukan efisiensi perencanaan anggaran belum dapat dilakukan dengan optimal. Dilihat dari formulasi kebijakan anggaran kebijakan yang berubah-ubah dikarenakan perubahan anggaran yang banyak terjadi ditambah dikarenakan adanya pandemi *Covid-19* perubahan anggaran yang tidak diduga, selain itu dilihat dari operasional anggaran Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung harus melakukan perekrutan pegawai sehingga memakan anggaran yang cukup besar, dan juga kualitas kompetensi pegawai dalam perencanaan anggaran belum optimal.

Referensi

- Anggara, S. (2015). *Metode Penelitian Administrasi*. Pustaka Setia.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik (Ketiga)*. Erlangga.
- Etikan, I. (2016). Comparison of Convenience Sampling and Purposive Sampling. *American Journal of Theoretical and Applied Statistics*, 5(1), 1. <https://doi.org/10.11648/j.ajtas.20160501.11>
- Halim, A. (2016). *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Hidayat, A. (2018). *Bunga Rampai Sistem Informasi Manajemen Publik*. UIN SGD.
- Kee, R. C. (2003). Operational Planning And Control With An Activity-Based Costing System. In *Advances in Management Accounting* (Vol. 11, pp. 59–84). JAI Press. [https://doi.org/10.1016/S1474-7871\(02\)11003-3](https://doi.org/10.1016/S1474-7871(02)11003-3)
- Lanka, E., Lanka, S., Rostron, A., & Singh, P. (2021). Why We Need Qualitative Research in Management Studies. *Revista de Administração Contemporânea*, 25(2). <https://doi.org/10.1590/1982-7849rac2021200297.en>
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. UII Press.
- Mahsun, M. (2019). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. BPFE-Yogyakarta.
- Mayasari, A., Fatah Natsir, N., & Haryanti, E. (2022). Aksiologi Ilmu Pengetahuan dan Keislaman. In *JiIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* (Vol. 5). <http://Jiip.stkipyapisdompou.ac.id>
- Nandang, Sholeh, S., & Maryati, M. (2021). Perencanaan Anggaran Dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Penelitian Tindakan Kelas Dan Pengembangan Pembelajaran*, 4(3).
- Nurkholis, & Khusaini, M. (2019). *Penganggaran Sektor Publik*. UB Press.
- Polzer, T., Nolte, I. M., & Seiwald, J. (2021). Gender budgeting in public financial management: a literature review and research agenda. *International Review of Administrative Sciences*. <https://doi.org/10.1177/00208523211031796>

- Prasetyo, E. B., Fatah Natsir, N., & Haryanti, E. (n.d.). Asumsi Dasar pada Ilmu Pengetahuan yang menjadi Basis Penelitian Pendidikan Islam. In *JiIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* (Vol. 5). <http://Jiip.stkipyapisdmpu.ac.id>
- Sakti, F. T. (2014). *Sisi Gelap Perencanaan (Studi Kasus Implementasi Kebijakan Kepala Daerah)*. FISIP Unpas Press.
- Sellang, K. (2016). *Administrasi Dan Pelayanan Publik Antara Teori dan Aplikasinya*. Ombak.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Manajemen*. Alfabeta.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press.
- Wance, M. (2019). Dinamika Perencanaan Anggaran Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Buru Selatan. In *IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration* (Vol. 5).
- William, F. W. (2011). *Program Budgeting And The Perfomance Movement*. Georgetown University Press.